BAB II

Susilo Bambang Yudhoyono dan Kebijakan Pemberantasan Korupsinya

A. Profil Susilo Bambang Yudhoyono

1. Masa Kecil dan Remaja

Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada tanggal 9 September 1949 di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, kira - kira 12 kilometer dari Kota Pacitan, Jawa Timur. Siti Habibah yang merupakan istri dari R.Soekotjo melahirkan anak laki – laki pertama mereka di lingkungan Pondok Pesantren Tremas selepas adzan dzuhur pada hari tersebut.[87] R.Soekotjo merupakan Komandan Komando Rayon Milter (Danramil) yang bertugas di kecamatan berbeda dengan Kecamatan Arjosari. Sehingga ketika masa kelahiran tersebut, Soekotjo tidak berada di tempat. Namun setelah mendengar kelahiran anaknya, Soekotjo segera bergegas pulang dan segera meletakkan pistol di dahi bayinya sebagai tanda syukur dan pengharapan masa depan anaknya.[88]

Nama Susilo Bambang Yudhoyono yang diberikan oleh R.Soekotjo mempunyai arti yakni "Susilo" berarti orang yang santun dan penuh kesusilaan. "Bambang" memiliki arti ksatria, sedangkan "Yudho", dan "Yono" berarti perang dan kemenangan.[89] Nama tersebut tidak mengherankan diberikan mengingat pekerjaan orang tuanya yang berada di kancah militer. Kehidupan orang tua SBY bukan merupakan kehidupan yang penuh kemewahan. Sebagai Danramil berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu) di

---

[87] Taufik Adi Susilo, *Lebih Dekat dengan SBY* (Yogyakarta : Garasi House Book, 2010), hal 9-10.
[88] *Ibid.*

daerah yang sepi dan gersang, gaji ayahnya hanya cukup untuk menghidupi kesederhanaan keluarganya.

Dilihat garis keturunannya, ayah Susilo Bambang Yudhoyono tersebut masih memiliki garis darah biru keturunan bangsawan Jawa. Kakeknya dari pihak ayah, R.Imam Badjuri merupakan anak kedua hasil pernikahan Kasanpuro atau Naib Arjosari II (keturunan Buwono Keling yang berasal dari Majapahit) dengan RM Kustilah (keturunan RMA Yudoningrat dan Gusti Bendoro Ayu, putri Sultan Hamengkubuwono III).[90] Sedangkan Habibah merupakan putri pendiri Pondok Pesantren Salafiyah, Tremas.[91]

Susilo Bambang Yudhoyono kemudian akrab dipanggil "Sus" oleh keluarganya. Susilo merupakan anak desa yang cerdas bergaul. R.Soektojo merupakan sosok yang memiliki disiplin tinggi. Sedangkan ibunya mendidik Susilo dalam urusan keagamaan. Perpaduan keduanya antara kehidupan agama serta kedisiplinan dijalani Susilo sejak kecil.[92]

Susilo Bambang Yudhoyono memiliki postur tubuh kurus tinggi dan berkulit kuning bersih.[93] Meskipun anak tunggal, hal itu tidak membuat Susilo menjadi manja karena perpaduan didikan kedua orang tuanya. Susilo merupakan anak yang sopan, dan mampu menjaga penampilan serta tindak tanduknya kepada orang lain.[94] Dengan wibawa dan kharismanya, ia selalu diandalkan oleh teman – temannya sebagai pemimpin diantara mereka.

---

[90] Wisnu Nugroho, *Pak Beye dan Keluarganya* (Jakarta : Kompas, 2011), hal 20.
[91] Garda Maeswara, *Op.Cit.*
[92] *Ibid.*
[93] Taufik Adi Susilo, *Op.Cit.*
[94] Fransiska Kurlinawati, "Pemikiran Politik Susilo Bambang Yudhoyono Tentang Demokrasi dan Tata Kelola pemerintahan", Skripsi Digital Fisipol Universitas Sumatera Utara 2009, diakses pada

Dengan kondisi keluarga yang sederhana, memasuki usia sekolah orang tuanya ingin agar Susilo mendapatkan jaminan pendidikan yang layak. Sehingga Susilo tinggal bersama dengan Sasto Suyitno, paman Susilo yang merupakan Lurah Desa Ploso Pacitan.[95] Susilo bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) Gajahmada, Desa Purwosari, Kecamatan Kebonagung Pacitan (sekarang SDN Baleharjo I). Susilo pada saat itu aktif di kepanduan dan rajin membaca buku. Susilo juga menyukai buku – buku pewayangan. Di dalam buku wayang dia mengetahui bagaimana kultur Jawa melakukan penghormatan, hirarkhi, dan sopan santun. [96]

Susilo Bambang Yudhoyono pandai bergaul dan senang berpetualang dengan kawan – kawannya.[97] Beberapa hobi Susilo kecil adalah bermain bola voli, dan *travelling,* baik dengan jalan kaki maupun menggunakan sepeda. Dalam bidang seni Susilo mengikuti berbagai macam kegiatan kesenian seperti melukis, teater, wayang orang, gamelan, serta drama. Beberapa karya puisinya juga sempat dikirimkan ke "Majalah Kuncung" yang merupakan majalah anak – anak pada saat itu.[98] Selain itu, Susilo juga menyukai kegiatan bermain musik yang diteruskan sampai sekarang.

Ketertarikan Susilo kepada dunia militer dimulai sejak kecil. Pada saat Susilo duduk di kelas tiga (3) Sekolah Rakyat, tempatnya dijadikan tempat latihan perang.[99] Sejak saat itu, timbul kekagumannya atas sosok prajurit. Kekaguman tersebut berbuah impian ketika ia untuk pertama kalinya diajak oleh ayahnya ke Akademi Militer Nasional (AMN). Susilo saat itu duduk di

[95] Garda Maeswara, *Op.Cit* hal 18.
[96] *Ibid.*
[97] Taufik Adi Susilo, *Op.Cit* hal 11-12.
[98] Fransiska Kurlinawati, *Op.Cit.*
[99] Garda Maeswara, *Op.Cit* hal 19-21.

ditunjukkan dalam bentuk penulisan artikel, puisi, cerpen, dalam majalah dinding sekolah.[104]

Kegiatan – kegiatan tersebut berlanjut sampai Susilo bersekolah di SMA 271 (sekarang SMA Negeri 1 Pacitan). Namun, saat itu R.Soekotjo dan Siti Habibah bercerai. R.Soekotjo menikah kembali dan menetap di Pacitan, sedangkan Siti Habibah memilih untuk tidak menikah lagi dan tinggal di Blitar.[105] Susilo Bambang Yudhoyono yang bersekolah di SMA 271 melanjutkan kegiatan dan hobinya seperti bermain band. Saat itu, Susilo merupakan pemain bass serta terkadang menjadi vokalis pada band sekolahnya yang bernama Gaya Taruna.

Pada saat usia SMA Susilo merupakan siswa yang menonjol.[106] Jika guru matematika berhalangan hadir, Susilo kerap kali dipercaya tampil ke depan untuk mengajar teman – temannya.[107] Selain itu, Susilo juga gemar bermain bola voli dalam klubnya yang bernama Rajawali bersama dengan teman – temannya.[108] Sampai akhirnya Susilo lulus dari jenjang Sekolah Menengah Atas pada tahun 1968.

2. Masa Pendidikan Militer

Keinginan untuk segera melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional sempat tertunda selama satu tahun dikarenakan kesalahan penerimaan informasi pendaftaran. Pada masa penantian itu, Susilo Bambang

(ITS) Surabaya meskipun hanya sampai pada tahap orientasi kampus. Selanjutnya Susilo memutuskan untuk masuk ke Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PG – SLP) Malang Jawa Timur.[109]

Masa tersebut dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk mendaftar di AMN tahun berikutnya. Pada tahun 1970, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjadi kadet AMN setelah lulus ujian penyaringan di Malang pada akhir tahun 1969, dan lulus pada tes lanjutan di Bandung. Tiga bulan pertama Susilo Bambang Yudhoyono menjalani pendidikan dasar militer sebagai calon taruna. Susilo kemudian dilantik menjadi taruna Akabri dengan pangkat Prajurit Taruna (Pratar) dan Kopral Taruna.[110] Satu angkatan dengan Susilo saat itu antara lain Agus Umar Wirahadikusumah, Ryamizad Ryacudu, dan Prabowo Subianto.

Di Akabri Susilo juga aktif dalam berbagai macam kegiatan. Salah satunya sebagai anggota drumband Akabri Darat Canta Lokananta.[111] Selain itu, Susilo juga masih gemar membaca berbagai macam buku. Pada tahun kedua pendidikan dengan pangkat Sersan Taruna, dia masuk ke Korps Infanteri. Kemudian terpilih menjadi Komandan Divisi Korps Taruna (Dandivkortar) membawahi 3.000 taruna Akademi Militer. Prestasi selama menjadi taruna dibuktikan ketika dia mendapatkan penghargaan Tri Sakti Wiratama bidang kepribadian, intelektual, dan fisik pada tahun 1973.[112]

Selain itu, Susilo juga mendapatkan penghargaan lain selama

(1970,1971, dan 1972) dan Bintang Intelek "Kartika Ati Tanggap" (1971-1972).[113] Susilo lulus dari pendidikan militer pada tanggal 11 Desember 1973 dengan predikat lulusan terbaik diantara 987 taruna seangkatannya saat itu dengan pangkat letnan dua infanteri (NRP 26418).[114] Ia lulus dengan meraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa atau setara dengan *Summa Cum Laude.* Susilo selanjutnya menempuh pendidikan di *Airbone and Ranger Course di Fort Benning Georgia,* Amerika Serikat.[115]

Secara terperinci,rekam jejak pendidikan pasca lulus akademi militer Susilo Bambang Yudhoyono[116] adalah sebagai berikut :

1. *Airbone and Ranger Course* di Fort Benning, Georgia AS (1976)
2. *American Languange Course* di Lackland Texas, AS (1976)
3. *Infantery Officer Advanced Course* di Fort Benning, Georgia AS (1982-1983)
4. *Jungle Warfare Training* di Panama (1983)
5. Kursus *Anti Tank Weapon* di Belgia dan Jerman (1984)
6. Kursus Komandan Batalyon di Bandung (1985)
7. Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung (1988-1989)
8. *Common and General Staff College* di Fort Leavenworth, Kansas, AS (1990-1991)
9. *Master of Art* (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

[113] Fransiska Kurlinawati, *Op.Cit.* hal 44.
[114] Taufik Adi Susilo, *Op.Cit* hal 24.
[115] Garda Maeswara, *Op.Cit.*hal 27.
[116] Fransiska Kurlinawati, *Op.Cit.* hal 45-46.

10. Doktor dalam Bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2004

3. Kehidupan Pasca Akabri

Setelah menyelesaikan pendidikan *Airbone and Ranger Course di Fort Benning Georgia* di Amerika Serikat pada tahun 1976, Susilo menikahi Kristiani Herawati yang merupakan putri dari Jenderal Sarwo Edhi Wibowo dengan Hj. Sunarti Sri Hadiyah. Pernikahan Susilo bambang Yudhoyono dengan Kristiani Herawati dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 1976. Jenderal Sarwo Edhi Wibowo sendiri merupakan prajurit yang memimpin RKPAD (sekarang Kopassus) dalam penaklukan G 30/S PKI. Prestasi kemiliteran Jenderal Sarwo Edhi Wibowo dikatakan gemilang sebagai Panglima Kodam II Bukit Barisan (1967-1968) dan Panglima Kodam XVII Cendrawasih (1968-1970) Namun, Sarwo Edhi Wibowo tidak diberikan kesempatan untuk meraih karir militer yang lebih tinggi oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya Sarwo Edhi Wibowo hanya mendapat jabatan sebagai Gubernur Akabri dan terakhir diberikan tugas sebagai Duta Besar Indonesia di Korea Selatan.[117]

Dari pernikahannya dengan Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono) tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono dikarunia dua putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhi Baskoro Yudhoyono. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai anak pertama mengikuti jejak ayahnya dengan menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer Tahun 2000. Sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono memilih jalan non militer dengan melanjutkan studi

Curtin University of Technology, Perth dengan dua gelar kesarjanaan yakni *Bachelor of Commerce* dan *Electronic Commerce.* Selanjutnya, Edhi Baskoro memasuki panggung politik Indonesia sebagai wakil rakyat di Parlemen Pusat.

4. Karir Militer

Prestasi pada masa pendidikan militer memberikan jalan yang mulus bagi karir Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam masa – masa meniti karirnya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan berbagai kesempatan untuk menempuh pelatihan dan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan di *Airbone and Ranger Course di Fort Benning Georgia* di Amerika Serikat pada tahun 1976 dan menikah dengan Kristiani Herawati karirnya mulai terbuka lebar. Dia memulai karir militernya dengan memangku jabatan sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan Pleton III di Kompi Senapan A, Batalion Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma Kostrad) pada tahun 1974-1976 yang membawahi 30 prajurit.[118]

Batalion Linud 330 merupakan salah satu dari tiga batalion di Brigade Infanteri Lintas Udara 17 KujangI/Kostrad yang terlibat dalam berbagai macam operasi militer. Ketiga batalion tersebut adalah Batalion Infanteri

328/Dirgahayu, dan Batalion Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak.[119] Susilo Bambang Yudhoyono memimpin pleton ini untuk melakukan pertempuran di Timor Timur.

Rincian karir Susilo Bambang Yudhoyono [120] selanjutnya di bidang militer adalah sebagai berikut :

1. Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
2. Dan Tonpan Yonif 335 Kostrad (1976-1977)
3. Dan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
4. Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
5. Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
6. Paban Muda Sops SUAS (1981-1982)
7. Komandan Sekolah Pelatihan Infanteri (1983-1985)
8. Dan Yonif 744 Dam IX Udayana (1986-1988)
9. Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
10. Dosen Sekolah Komando Angkatan Darat (Seskoad) (1989 -1992)
11. Korspri Pangab (1993)
12. Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
13. Asops Kodam Jaya (1994-1995)
14. Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
15. *Chief Military Observer United Nation Peace Forces* (UNPF) di Bosnia Hezergovina (sejak awal November 1995)
16. Kasdam Jaya (1996 - hanya lima bulan)
17. Pangdam II Sriwijaya (1996 - sekaligus Ketua Bankorstanasda)

18. Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)

19. Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI) tahun 1998-1999

Selain tugas – tugas militer di dalam negeri, Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan misi di luar negeri. Yaitu ketika dia dipercaya menjadi perwira Kepala Pengamat Militer PBB yang bertugas mengawasi gencatan senjata di bekas Negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia Hezergovina.[121] Kiprahnya terkait reformasi ABRI terlihat pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie sebagai salah satu konseptor reformasi di tubuh ABRI.[122]

Sedangkan penghargaan kemiliteran yang pernah diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono [123]diantaranya sebagai berikut :

1. Tri Sakti Wiratama (Prestasi Tertinggi Gabungan Mental, Fisik, dan Intelek) 1973
2. Adhi Makayasa (Lulusan Terbaik Akabri 1973)
3. Satya Lencana Seroja (1976)
4. *Honor Graduate* IOAC, USA (1983)
5. Satya Lencana Dwija Sista (1985)
6. Lulusan Terbaik Seskoad Susreg XXVI (1989)
7. Dosen Terbaik Seskoad (1989)
8. Satya Lencana Santi Dharma (1986)
9. Satya Lencana United Nations Peacekeeping Force (UNPF) 1986
10. Satya Lencana United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja, and Western Sirmium (UNTAES) 1996

---

[121] *Ibid,* hal 32.
[122] Taufik Adi Susilo, *Op.Cit* hal 30.
[123] Garda Maeswara, *Op.Cit.*hal 203.

11. Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (1998)
12. Bintang Yudha Dharma Nararya (1998)
13. Wing Penerbang TNI AU (1998)
14. Wing Kapal Selam (1998)
15. Bintang Kartika Eka Paksi Pratama (1999)
16. Bintang Yudha Dharma Pratama (1999)
17. Bintang Dharma (1999)
18. Bintang Mahaputra Utama (1999)

Sepanjang kurang lebih 27 tahun Susilo Bambang Yudhoyono menjalani pengabdiannya di TNI Angkatan Darat. Masa pensiunnya dipercepat lima tahun karena diangkat menjadi menteri pada masa Presiden Gus Dur. Dari fakta ini, karir militernya terhenti sebagai Kaster ABRI dengan pangkat Letnan Jenderal dan pensiun pada tanggal 1 April 2001 sebagai Jenderal Kehormatan.[124] Presiden Gus Dur saat itu memintanya untuk masuk di kabinet pemerintahannya, dengan terlenih dahulu memberikan pangkat Jenderal Kehormatan pada tanggal 27 Januari Tahun 2000. Karir militernya memang tidak sampai pada posisi tertinggi, namun malah membawanya ke pintu gerbang ke dunia politik di Indonesia.

5. Karir Politik

Karir politik Susilo Bambang Yudhoyono terbuka sejak reformasi bergulir pada tahun 1998. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Wirahadikusumah muncul sebagai tokoh reformis di tubuh ABRI yang

[124] Fransiska Kurlinawati, *Op.Cit.* hal 48.

dilanda krisis kepercayaan. Pada pemerintahan Presiden Gus Dur, dia melepas karir militernya dengan menjadi Menteri Pertambangan dan Energi. Sebelumnya, pada masa Presiden Soeharto terdapat wacana bahwa Susilo Bambang Yudhoyono akan diberikan jabatan sebagai Menteri Penerangan, demikian juga pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie namanya dijadikan calon Menteri Dalam Negeri.[125] Namun keinginan untuk tetap di dunia militer menghalangi permintaan tersebut, sampai pada akhirnya permintaan dari Presiden Gus Dur diterima oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu dilakukan atas berbagai pertimbangan serta saran dari ayahnya, R.Soekotjo.[126]

a. Masa Pemerintahan Gus Dur

Dimulainya karir politik SBY adalah pada saat terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999. Pasca reformasi, figur Susilo Bambang Yudhoyono lebih banyak muncul ke permukaan publik karena perannya dinilai penting dalam kondisi sosial politik Indonesia setelah rezim orde baru runtuh.[127] Setelah menimbang untuk terlibat dalam kabinet pemerintahan, Susilo Bambang Yudhoyono menerima tawaran Presiden Gus Dur untuk menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben). Peran yang dilakukan sebagai Mentamben saat itu terhitung sangat berani karena Susilo Bambang Yudhoyono bukan berasal dari bidang pertambangan. Salah satu peran

upaya pemberantasan dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.[128]

Posisi sebagai Menteri Pertambangan dan Energi ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan antara Presiden Gus Dur dengan pihak TNI.[129] Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Mentamben tidak terlihat prestasinya. Kinerjanya kebanyakan hanya bersifat kunjungan kerja dan pidato – pidato yang sifatnya normatif. Salah satu kasus yang menjadi isu bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan orang yang tidak tegas muncul ketika perusahaan Karahas Bodas Company memenangkan tuntutan kepada pemerintah. Karahas Bodas Company (KBC) menuntut pemerintah dalam hal ini Pertamina dan PLN melalui Pengadilan Arbitrase Internasional karena membatalkan izin proyek listrik tahun 1997 yang tendernya telah dimenangkan oleh KBC. Pihak KBC mengajukan tuntutan sebesar 290 juta dolar AS kepada pemerintah.

Ketika penuntutan dilakukan, tidak membuat Susilo Bambang Yudhoyono berinisiatif melakukan *counter* atau upaya hukum yang nyata, sehingga pihak KBC memenangkan tuntutan tersebut.[130] Kasus ini berbuntut panjang sampai akhirnya keputusan – kputusan diambil Arbitase Internasional, Pengadilan Rendah, dan Pengadilan Tinggi di New York, AS. Kemenangan tuntutan KBC membuahkan keputusan bahwa dana pemerintah RI dari LNG sebesar 500 juta dolar AS tidak dapat dicairkan. Dana tersebut baru dapat dicairkan jika pemerintah RI [illegible] KBC beserta bunga sejumlah 290 juta dolar AS

Bukan hanya itu saja dampaknya, namun jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka PT Petral (Aset Pertamina di Hongkong) terancam disita.[131] Ketidaktegasan Susilo bambang Yudhoyono dalam menghadapi persoalan tersebut memberikan bukti bahwa tidak ada pencapaian signifikan selama karirnya menjabat sebagai Mentamben.

Karir politiknya berlanjut ketika dia dipercaya menjabat Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Menkosospolkam) dalam *reshuffle* kabinet yang dilakukan Gus Dur pada 26 Agustus 2000. Susilo Bambang Yudhoyono menempati jabatan tersebut menggantikan Wiranto yang tersandung masalah referendum Timor Timur.Dalam kiprahnya sebagai Menkosospolkam, salah satu tugas yang diemban adalah pendekatan kepada Keluarga Cendana untuk bersedia memberikan hartanya demi kepentingan Negara. Terutama harta Soeharto yang masih tersimpan di luar negeri. Lobi yang dilakukan merupakan usaha menjawab penantian publik atas keputusan pengadilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM oleh penguasa orde baru tersebut.[132]

Namun, tugas tersebut tidak terlihat dampak positifnya. Susilo Bambang Yudhoyono tidak menunjukkan kepastian akan pengusutan tuntas harta keluarga Soeharto. Hal ini berbeda dengan apa yang disampaikannya kepada publik bahwa keluarga Cendana bersedia merelakan separuh harta mereka kepada rakyat Indonesia.[133] Ini membuktikan tidak ada konsistensi antara apa yang telah diucapkan

Yudhoyono untuk melakukan tugas tersebut didasarkan pada asumsi bahwa dia dekat dengan keluarga Cendana.[134]

Pada saat pemerintahan Gus Dur, terjadi peristiwa sejarah yang menunjukkan ketegangan antara parlemen dengan presiden. Muncul krisis konstitusional di dalam interaksi tersebut. Penyebab hal tersebut adalah *Bullog Gate* atau *Brunei Gate.*[135] Presiden Gus Dur dinilai terlibat dalam usaha pencairan dana bulog dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan mengenai bantuan Sultan Brunei Darussallam.[136] Masalah tersebut tidak menemukan jalan mulus dalam penyelesaiannya, sehingga Gus Dur ingin mengeluarkan Dekrit Presiden untuk membubarkan parlemen.

Permasalahan tersebut membuat DPR memberikan Memorandum meminta pertanggungjawaban Gus Dur mengenai penyelenggaraan Negara yang bebas KKN. Isu tersebut direspon Gus Dur dengan rencana untuk membubarkan DPR. Keinginan tersebut muncul terkait dengan unjuk rasa besar – besaran anti Gus Dur di gedung DPR/MPR pada tanggal 29 Januari 2001 sebagai respon isu pemakzulan presiden atau *impeacmment.* Yusril Irza Mahendra saat dimintai pendapat oleh Gus Dur menyatakan bahwa sebaiknya presiden tidak membubarkan DPR namun bisa mempertimbangkan pembekuan jika terjadi situasi darurat.[137]

---

[134] Taufik Adi Susilo, *Op.Cit* hal 34.
[135] Garda Maeswara, *Op.Cit.*hal 50-51.
[136] Fransiska Kurlinawati, *Op.Cit.*hal 51.

Dengan memburuknya hubungan Gus Dur dengan parlemen sejak Memorandum I dengan isu pemakzulan, relasi antara Megawati Soekarnoputri dengan Gus Dur juga memburuk. Sehinga perlu ada kompromi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Ketertarikan Gus Dur untuk lebih mengakomodir membaiknya hubungan antara presiden, wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Serta parlemen diwujudkan dalam dibentuknya Tim Tujuh (7). Tim 7 merupakan lembaga *crisis centre* non struktural yang memberikan rekomendasi kepada presiden atas krisis yang terjadi.[138] Tim 7 ini beranggotakan Menkosospolkam, Susilo bambang Yudhoyono; Menteri Luar Negeri, Alwi Sihab; Menko Perekonomian, Rizal Ramli; Menteri Pertahanan, Mahfud MD; Menteri Kehakiman dan HAM, Baharuddin Lopa; Menteri Dalam Negeri/Otonomi Daerah, Surjadi; dan Jaksa Agung, marzuki Darusman. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Harian Tim 7, kemudian menempatkan pusat operasi serta kegiatan di kantor Menkosospolkam.

Konsep Tim 7 ini adalah untuk mengadakan rekonsiliasi atara Gus Dur – Megawati sehingga berdampak pada menurunnya ketegangan di parlemen. Kiprah SBY dalam Tim ini sebagai ketua kurang membuahkan hasil. Komunikasi yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono ketika menghadap Megawati kurang dapat mengenai sasaran karena tidak *to the point* pada hal yang dimaksud.[139] Komunikasi politik yang ditunjukkan

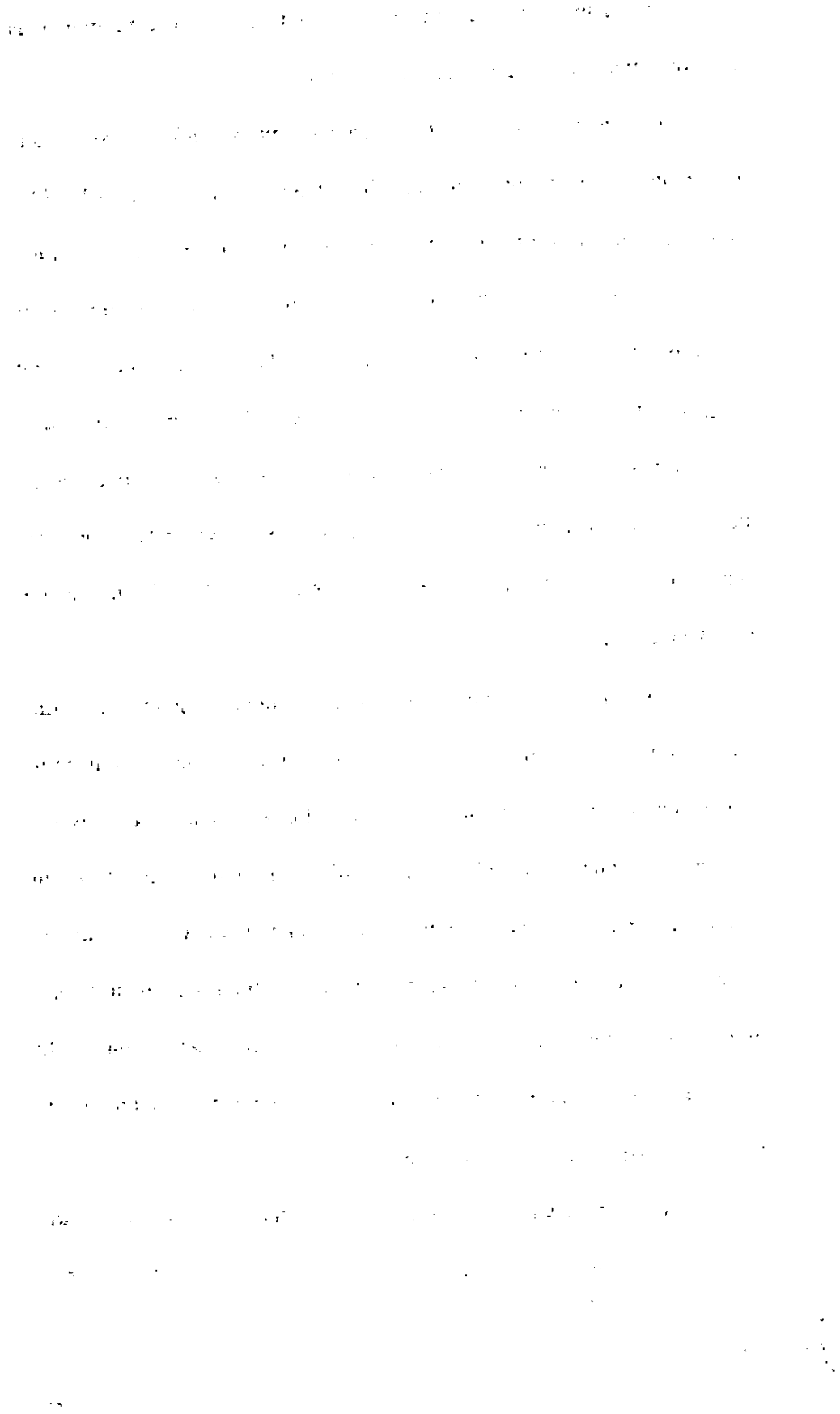

Jawa.[140] Rekonsiliasi yang direncanakan oleh Tim 7 tidak membuahkan hasl sehingga dibubarkan pada 25 Mei 2001.

Ketegangan yang tidak mencair menyebabkan Gus Dur mengeluarkan maklumat (semacam Supersemar) tertanggal 28 Mei 2001 tiga hari sebelum masa *deadline* Memorandum II parlemen. Maklumat tersebut berisi perintah kepada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menkosospolkam sebagai berikut : *"mengambil tindakan – tindakan dan langkah khusus yang diperlukan guna mengatasi krisis serta menegakkan ketertiban, keamanan dan hukum secepat – sepatnya"*.[141] Maklumat ini dapat diartikan sebagai tugas khusus kepada Susilo Bambang Yuhoyono untuk menghentikan proses Sidang Istimewa MPR dalam rangka pemakzulan Gus Dur.

Peran Susilo Bambang Yudhhoyono sangat diharapkan untuk mendinginkan suhu politik saat itu. Situasi darurat sebagai syarat untuk menjalankan mandat maklumat tidak diterjemahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana keinginan Gus Dur. Hal ini didasarkan pada pendapat petinggi TNI yang tidak melihat bahwa kondisi di Indonesia belum dapat dikatakan darurat.[142] Ketidaksanggupan Susilo Bambang Yudhoyono dalam memenuhi keinginan Gus Dur menyebabkan jabatannya sebagai Menkosospolkam harus ditanggalkan karena reshuffle yang dilakukan Gus Dur.

Sidang Istimewa MPR yang memutuskan untuk melakukan

memutuskan presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru. Sidang Istimewa memutuskan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia ke-lima. Yang menarik terkait perjalanan politik Susilo Bambang Yudhoyono adalah diajukannya dirinya sebagai salah satu kandidat wakil presiden mendampingi Megawati. Artinya, keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono dalam dunia politik di Indonesia telah dilihat berbagai pihak.

Dukungan diterima oleh Susilo Bambang Yudhoyono dari banyak pihak. Pada saat itu Susilo Bambang Yudhoyono didukung sebagai Wapres oleh tokoh – tokoh PDIP, Golkar, Utusan Golongan, dan Kesatuan Kebangsaan Indonesia.[143] Pada tanggal 24 Juli 2001 Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia secara resmi mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono bersaing dengan Hamzah Haz, Akbar Tandjung, Agum Gumelar, dan Siswono Yudhohusodo.[144] Dengan hasil dua kali tahap pemilihan memenangkan Hamzah Haz daripada calon yang lain, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono.

b. Masa Pemerintahan Megawati

Pemerintahan Megawati memberikan kesempatan bagi Susilo Bambang Yudhoyono untuk melanjutkan karir politik dengan jabatan sebagai Menko Polkam. Tugas sebagai Menko Polkam di Kabinet Gotong Royong ini membuat Susilo Bambang Yudhoyono harus mampu bekerja keras. Mengembalikan kepercayaan dunia bahwa keamanan di Indonesia terjamin adalah salah satu diantaranya.[145]

---

[143] Dr. Dino Patti Djalal, *Harus Bisa; Seni Memimpin Ala SBY* (Indonesia : Red *and White Publishing*, 2008), hal 201.
[144] *Ibid.*
[145] Garda Maeswara, *Op.Cit.*,hal 58-60.

Pemerintahan Megawati saat itu mendapatkan berbagai macam tantangan keamanan nasional. Sebagai contoh merebaknya gerakan radikal sejak 1998 menorehkan peristiwa – peristiwa yang tidak terduga. Selama kurun waktu 1998 – 2001 sendiri ada sekitar 50 peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh para pelaku terorisme, meskipun ada beberapa yang diklaim dilakukan oleh penjahat kriminal, serta yang lainnya dilakukan oleh kelompok separatis atau kelompok Islam ekstrimis.[146] Peristiwa teror seperti ini kemudian pada tahun 2002 terjadi kembali dalam tragedi bom Bali. Tragedi tersebut cukup menjadikan keprihatinan panjang bangsa Indonesia.

Selain beberapa peristiwa pengeboman tersebut, selaku Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono juga dihadapkan pada tantangan akan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussallam. Konflik yang terjadi di Aceh berawal dari pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) pada saat Orde Baru. Penawaran dilakukan pemerintah dengan memberikan otonomi khusus, syariat islam, serta otonomi dan pembagian kekayaan pasca pemberontaka Daud Beureureh.[147] Namun, tanggapan yang diperoleh setelah itu adalah tuntutan kemerdekaan Aceh (GAM) dari Tengku Hasan Tiro .

Situasi di bumi serambi Mekkah tersebut mengharuskan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan berbagai macam upaya penyelesaian pada kurun waktu Tahun 2002 – 2003. Untuk penyelesaian konflik tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono mengalami kegagalan pada tahap

[146] M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2010), hal 721.
[147] Garda Maeswara, *Op.Cit.*

perundingan dengan jasa *Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue* dari Jenewa demi perdamaian Aceh. Hal ini dikarenakan penyerbuan militer terhadap para pemonitor gencatan senjata.[148]

Konflik lain yang mencoreng dunia keamanan di Indonesia adalah konflik yang terjadi di Indonesia bagian timur. Konflik yang terjadi di Maluku juga layak mendapatkan perhatian dari Menko Polkam saat itu. Sampai akhirnya Megawati selaku presiden mencabut pemberlakuan Status Darurat Sipil di Maluku setelah melihat perkembangan perekonomian masyarakat yang mulai membaik.[149] Namun dari keberhasilan meredam konflik tersebut, ada penilaian bahwa Susilo Bambang Yudhoyono selaku Menko Polkam tidak banyak memberikan peran berarti di lapangan. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono melimpahkan tugas lapangan tersebut lebih banyak kepada Jusuf Kalla sebagai Menko Kesra karena banyaknya korban jiwa yang timbul.[150] Susilo Bambang Yudhoyono hanya tampil dalam penandatangan perjanjian Malino I dan II.[151]

Hasrat Politik Susilo Bambang Yudhoyono pasca tidak terpilihnya dia menjadi wakil presiden mendampingi Megawati kemudian dilanjutkan dengan mendirikan Partai Politik. Pendirian Partai Politik memang hal yang sangat memungkinkan untuk dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono mengingat popularitasnya di kalangan tokoh –

bertempat di Apartemen Hilton, Jakarta dilakukan pertemuan yang membentuk tim pelaksana terdiri dari Vence Rumangkang, Drs.A.Yani Wahid (Alm), Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault,SH , Baharuddin Tonti, dan Shirato Syafe'i. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2001 Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung pertemuan lanjutan dimana Vence Rumangkang menyatakan rencana pendirian partai dan hasil – hasilnya akan dilaporkan pada Susilo Bambang Yudhoyono.[152]

Pada tanggal 20 Agustus 2001, dengan bantuan darii Drs. Sutan Bathoegana, Vence Rumangkang membentuk Tim Sembilan (9) yang bertugas mematangkan konsep pembentukan Partai Politik. Tim Sembilan beranggotakan sepuluh orang yakni Vence Rumangkang, Dr. Ahmad Mubarok,MA., Drs. A. Yani Wachid (Alm) , Prof.Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH Heroe Syswanto Ns (Sys Ns), Prof.Dr.RF. Saragih,SH.,MH., Prof. Dardji Darmodiharjo, Prof.Dr.Ir. Rizald Max Rompas, dan Prof.Dr. T Rusli Ramli, MS.[153] Dengan aturan perundangan yang menyatakan bahwa pembentukan Partai Politik minimal beranggotakan lima puluh (50) orang, maka Tim 9 berfikir untuk melengkapi jumlah anggota menjadi Sembilan Puluh Sembilan orang. Partai Demokrat kemudian didirikan pada tanggal 9 September 2001 di Gedung Graha Pratama Lantai XI Jakarta Selatan. Angka Sembilan yang banyak mewarnai Partai Demokrat dilandaskan pada hari kelahiran Susilo Bambang Yudhoyono yakni Tanggal 9

tanggal yang sama.[154] Sedangkan Ketua Umum Partai saat itu adalah Prof.Dr.Subur Budhisantoso.

Pada tanggal 25 September 2001, Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM untuk peresmian Partai Demokrat diterbitkan. Tanggal 9 Oktober 2001, Departemen Kehakiman dan HAM RI menerbitkan Lembaran Berita Negara No 81 Tahun 2001 tentang pengesahan Partai Demokrat dan Lambangnya.[155] Pendeklarasian Partai Demokrat dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta Hilton Convention Center, dilanjutkan dengan Rakernas pertama tanggal 18-19 Oktober 2001. Kemudian disusunlah perangkat – perangkat organisasi dalam Partai Demokrat.

Posisi kepemimpinan Megawati saat itu memang hanya untuk mengisi kursi kepresidenan sampai saat pemilu tahun 2004. Keinginan untuk memperjuangkan kursi kepresidenan sekali lagi pada tahun tersebut ternyata tidak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Gerakan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan mendirikan Partai Demokrat menimbulkan kecurigaan Megawati bahwa dia akan mencalonkan diri di bursa presiden pada pemilu 2004.

Isu pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono inilah yang menjadi bibit konflik antara Megawati dengannya. Sikap Menko Polkam yang tidak berterus terang atas keinginannya mencalonkan diri dalam bursa pemilihan presiden tersebut, membuat Megawati menganggapnya menelikung dari belakang. Susilo Bambang Yudhoyono saat dimintai

konfirmasi mengenai isu pencalonan tersebut menyimpan keengganan untuk mengatakan hal yang sesungghunya. Susilo Bambang Yudhoyono malah menyatakan ingin berkonsentrasi dalam tugasnya sebagai Menko Polkam.[156]

Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki jawaban tegas ketika mendapatkan pertanyaan mengenai kebenaran pencalonan dirinya. Namun, faktanya, memasuki tahun 2004 wajahnya sering tampil di layar televisi terkait dengan sosialisasi pemilu. Maraknya tayangan tersebut dinilai dari berbagai pihak sebagai kampanye terselubung dari Susilo Bambang Yudhoyono.[157] Tayangan sosialisasi itu dihentikan oleh Komisi Pemilihan Umum karena protes dari berbagai Partai Politik.[158] Sejak saat itu kemudian figur Susilo Bambang Yudhoyono banyak dikenal luas, dan akhirnya popular dengan sebutan SBY.

Gerakan yang dilakukan oleh SBY dan kawan – kawannya tersebut nyatanya membuat kubu Megawati geram, dan diam – diam mengucilkan SBY dari kabinet.[159] Pengucilan tersebut dilakukan dalam bentuk tidak dilibatkannya SBY sebagai Menko Polkam pada pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Kampanye Pejabat Tinggi Negara dan Pemantau Pemilu di Seluruh Provinsi.[160] Pihak Megawati saat itu berkilah bahwasanya SBY sedang bertuugas di Bejing, China.

Selanjutnya perseteruan Megawati dan Menko Polkam tersebut berakhir ketika surat pengunduran diri Susilo Bambang Yudhoyono

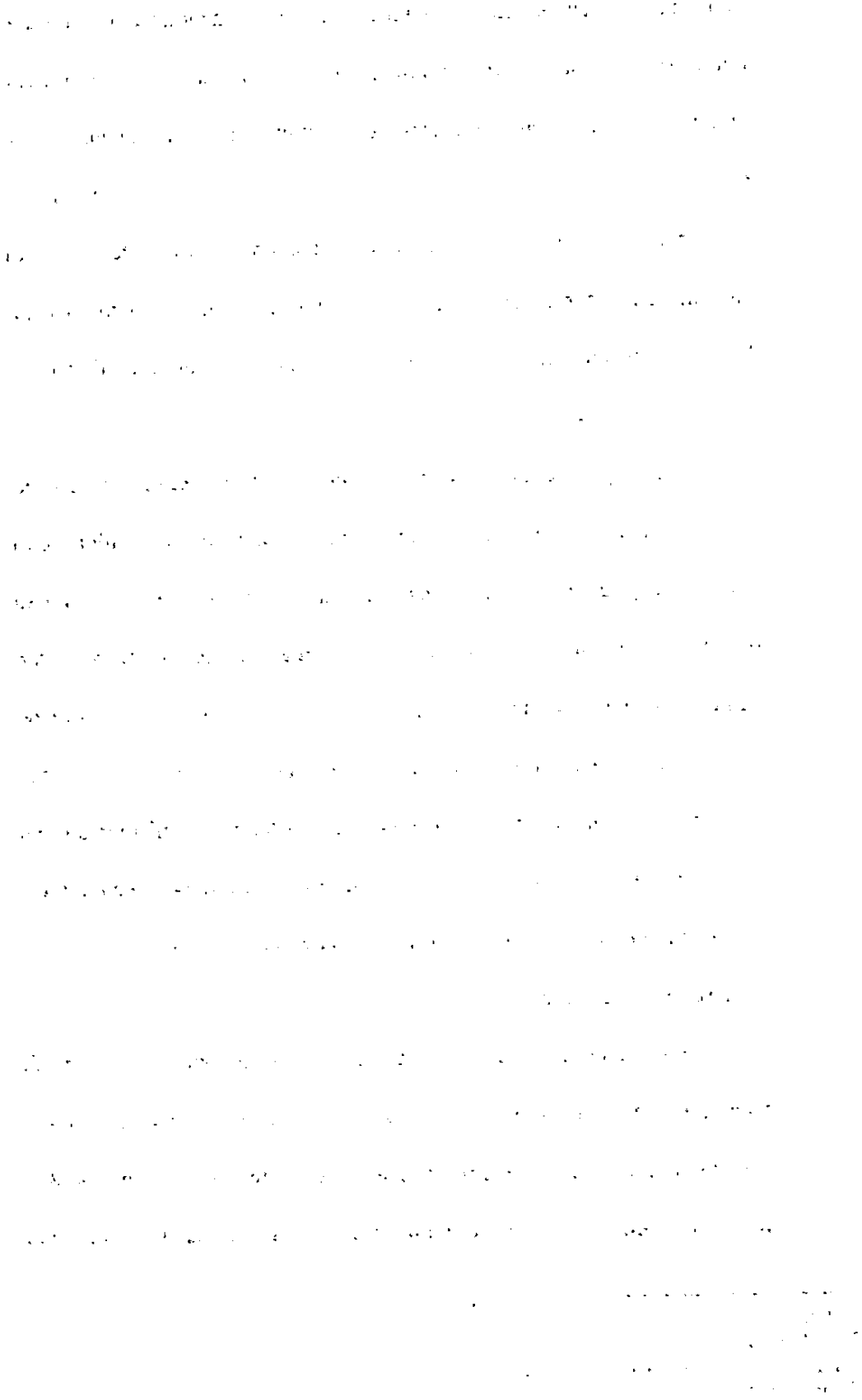

dilayangkan pada tanggal 11 Maret 2004.[161] SBY mendapatkan citra dari publik sebagai menteri yang diikucilkan oleh pimpinannya. Alasan SBY mundur adalah karena ia merasa tidak mempunyai kewenangan dan sumber daya lagi.[162] Hal ini menarik untuk dicermati karena sehari pasca pengunduran dirinya SBY melakukan kampanye Partai Demokrat di daerah. Sehari pasca penyerahan surat pengunduran diri, Mantan Menko Polkam tersebut melakukan kampanye Partai Demokrat di daerah Banyuwangi, Jawa Timur.[163]

Taktik politik SBY dalam menjaga konflik dengan Megawati kemudian berhasl menjadi sumber pencitraan bagi dirinya. Tujuan dari taktik "pengucilan" dirinya tersebut adalah untuk menarik simpati publik.[164] Pemeliharaan konflik dengan Megawati justru berpengaruh positif terhadap popularitas SBY. Sedangkan Megawati tercitrakan sebagai pimpinan yang bertindak sewenang – wenang kepada bawahannya. Dalam situasi menjelang pemilu tentu hal ini menjadi isu yang sangat menarik bagi media massa. Pertarungan selanjutnya kemudian ditentukan dalam pemilihan presiden tahun 2004.

c. SBY sebagai Presiden RI

Pemilu 2004 merupakan momentum luar biasa dalam hajat politik yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum menjadi agenda utama yang mempengaruhi kehidupan politik masyarakat Indonesia dengan keharusan untuk melek politik. Aktifitas nasional

[161] Prof. Tjipta Lesmana, *Op.Cit* hal 288.
[162] *Ibid,* hal 307.
[163] *Ibid, hal 288,* Dikutip dari Kompas, 14 Maret 2004.
[164] *Ibid,* hal 307.

disibukkan dengan agenda pemilihan anggota dewan dan presiden. Pemilihan umum diperuntukkan bagi DPR dengan jumlah kursi kurang lebih 550 buah. Diikuti dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta DPD yang diselenggarakan pada bulan April. Pembentukan DPD juga berimplikasi pada pemilihan Presiden dan wakil presiden yang tidak lagi ditentukan oleh MPR RI.

Tabel 2.1 : Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004

Partai	Suara Sah	% Suara Sah	Kursi Parlemen	% Kursi parlemen
Golkar	24480757	21,6 %	128	23,3 %
PDIP	21026629	18,5 %	110	20 %
PKB	11989564	10,6 %	53	9,6 %
PPP	9248764	8,2 %	57	10,4 %
Demokrat	8455225	7,5 %	58	10,5 %
PKS	8325020	7,3 %	45	8,2 %
PAN	7303324	6,4 %	54	9,8 %
Lain - lain	22633131	19,9 %	45	8,2 %
Total	113462414	100 %	550	100 %

Sumber : M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern[165]

Terkait dengan hasil pemilu pada 2004, perhatian publik tertuju pada munculnya partai politik baru dan kemudian menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi selanjutnya. Partai tersebut diantaranya adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Melalui Partai Demokrat inilah sosok Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai tokoh yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai presiden berdampingan dengan Jusuf Kalla sebagai wakil

dari publik bahwa mereka merupakan pasangan yang cocok mewakili unsur Jawa dan Non Jawa.

Pemilu Presiden 2004 yang diikuti oleh lima pasangan berlangsung ketat pada putaran pertama. Dengan hasil sebagai berikut : SBY – JK 33,57 %, Mega – Hasyim 26,60 %, Wiranto – Gus Sholah 22,15 %, Amien Rais – Siswono 14,65 %, dan Hamzah Haz – Agum Gumelar sekitar 3 %.[166] Kemenangan SBY – JK ditentukan pada pemilu presiden putaran kedua dengan hasil SBY – JK memperoleh 60,62 % suara, dan Mega – Hasyim memperoleh 39,38 % suara.[167] Terpilihnya pasangan tersebut merupakan hasil dari efektifitas marketing politik yang dilakukan oleh tim sukses mereka dengan jargon "Bersama Kita Bisa".

Kepemimpinan SBY yang meneruskan orde reformasi memberikan ekspektasi beragam. Kiprahnya sebagai mantan pejabat militer disangsikan pihak – pihak yang trauma terhadap otoritarianisme Soeharto. Terpilihnya SBY melegitimasi mitos bahwa pemimpin dari kalangan suku Jawa masih sangat diperhitungkan. Meskipun belakangan karakteristiknya banyak dikritik karena dianggap kurang tegas serta banyak bimbang dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan SBY nyatanya banyak diwarnai dengan bencana alam di Indonesia. Salah satunya yang terbesar pada awal masa pemerintahan adalah peristiwa Tsunami Aceh. Pada tanggal 26 Desember 2004 bencana alam tsunami tersebut melumpuhkan wilayah Aceh dan sekitarnya. Bencana ini menjadi salah satu bencana terbesar di dunia

[166] Garda Maeswara, *Op.Cit.* hal 95-96.

modern.[168] Kejadian tersebut memberikan dampak psikologis besar bagi rakyat Indonesia. Namun, momen tersebut memberikan keuntungan dengan terbukanya jalan untuk melakukan perdamaian dengan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dalam kiprahnya memimpin Kabinet Indonesia Bersatu I dua kali perombakan kabinet dilakukan oleh SBY. Namun tarik ulur kepentingan dalam koalisi di parlemen menyebabkan proses *reshuffle* terkesan diulur – ulur. Adapun dalam pemerintahan periode pertama, terjadi dua kali perombakan kabinet yang dilakukan oleh SBY.[169]

Pertama, pada tanggal 5 Desember 2005 SBY mengumumkan perombakan kabinetnya. Sejumlah menteri hanya mengalami reposisi seperti Aburizal Bakrie, Fahmi Idris, dan Sri Mulyani. Menteri baru yang ditunjuk adalah Boediono, Paskah Suzeta, dan Erman Suparno. Sedangkan menteri yang dikeluarkan dari kabinet adalah Alwi Sihab, Jusuf anwar, dan A.Nitimiharja. *Kedua,* pada 7 Mei 2007 SBY mengumumkan Mohammad Nuh, Hendarman Supandji, Jusman Syafi'i Jamal, Andi Mattalata, serta Muhammad Lukman Edy menjadi anggota kabinet baru. Sedangkan Hatta Radjasa dan Sofyan Jalil mengalami reposisi. Adapun menteri yang diputuskan keluar adalah Yusril Irza Mahendra, Hamid Awaluddin, Abdul Rahman Saleh, dan Syaifullah Yusuf.[170]

Pemerintahan SBY nyatanya mendapatkan banyak tantangan khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Soesatyo (2011:xi)

mengatakan bahwa SBY merupakan presiden yang paling banyak menyatakan diri siap berperang melawan kejahatan korupsi di Indonesia. Kinerja pemberantasan korupsi diharapkan signifikan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon komitmen yang disampaikan oleh pemerintahan SBY. Terbukti dengan dijeratnya sejumlah oknum kepala daerah, oknum politisi, hingga oknum penegak hukum, termasuk besan SBY sendiri Aulia Pohan.[171]

Hasil yang ditunjukkan oleh KPK memang memberikan harapan cukup tinggi atas pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga hal ini melegitimasi konsistensi komitmen anti korupsi SBY yang tidak pandang bulu. Meskipun dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat kelemahan – kelemahan yang dibaca oleh publik. Pernyataan ataupun kebijakan SBY dianggap tiidak sejalan dengan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh pada kasus Anggota DPR Al-Amin Nur Nasution dan Jaksa Urip Tri Gunawan. Anggota DPR dan Jaksa Senior ditangkap atas Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini menimbulkan berbagai macam spekulasi. Salah satunya adalah spekulasi bahwa KPK menjebak mereka. Sesuai kejadian tersebut, pada tanggal 15 April 2008 SBY memberikan penyataan kepada publik sebagai berikut : *"Kalau ada warganegara yang melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum karena tidak tahu, sesungguhnya kita ikut bersalah. Lebih jelek lagi, jangan sampai menjebak, dibiarkan saja.*

[171] Bambang Soesatyo, *Perang – Perangan Melawan Korupsi; Pemberantasan Korupsi di Bawah*

Nanti kena, nanti. Padahal kita bisa mengingatkan".[172] Dalam penggalan ini, disampaikan bahwa aspek sosialisasi merupakan hal yang *urgent* sebelum penindakan kejahatan korupsi. Namun, selanjutnya apa yang disampaikan SBY tidak jelas atas kasus mana yang dimaksud dan apakah hal itu berarti SBY melegitimasi isu KPK melakukan penjebakan atau tidak.[173]

Selain bencana alam dan kasus korupsi yang bergiliran mewarnai pemerintahan SBY, ada isu lain yang menyita perhatian masyarakat luas. Yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang menimbulkan pro kontra. Kenaikan harga BBM dengan asumsi untuk penyelamatan APBN yang membengkak karena subsidi dilakukan sebanyak dua kali pada pemerintahan SBY periode pertama saat itu. Dengan kondisi perekonomian dunia yang memburuk dan harga minyak mentah dunia yang melangit, pada 1 Maret 2005 dan 1 Oktober 2005 pemerintah menaikkan harga BBM.[174]

Pada tahun – tahun tersebut, konflik antar SBY dan Jusuf Kalla menjadi topik hangat. Hal ini dikarenakan peran Jusuf Kalla dianggap lebih dominan dalam keputusan – keputusan strategis yang cenderung lebih beresiko terhadap popularitas pemerintahan SBY. Kepemimpinan nasional di bawah SBY secara umum tidak tegas namun populer dan Jusuf Kalla yang lebih tegas namun kurang populer.[175] Karakteristik

[172] Dikutip dari Kompas, 14 Maret 2004 dalam Prof. Tjipta Lesmana, *Op.Cit, hal 321-322.*
[173] Prof. Tjipta Lesmana, *Op.Cit, hal 321-322.*
[174] Dr. Dino Patti Djalal, *Op.Cit, hal 53.*
[175] M.C. Ricklefs, *Op.Cit,* hal 732.

kepemimpinan SBY sebagai seorang yang berasal dari suku Jawa banyak diartikan sebagai ketidaktegasan sifat orang Jawa.

Hal ini berimplikasi pada pemilu selanjutnya pada tahun 2009 yang menyebabkan SBY meninggalkan Jusuf Kalla sebagai pasangan duet dan lebih memilih Boediono dari kalangan teknokrat murni yang juga merupakan suku Jawa. Alasan pemilihan Boediono kental dengan keinginan SBY untuk tetap jadi pemimpin dan simbol tunggal dalam konteks Negara Republik Indonesia. Kemungkinan besar, karakter Boediono cenderung tidak *neko – neko* atau *manut,* dan tidak banyak mengumbar pembicaraan di publik merupakan kelebihan di mata SBY. Sehingga SBY tidak akan kehilangan pamor sebagai simbol tertinggi atas kepemimpinan Indonesia.

Pada pemilu 2009, faktanya SBY-Boediono memperoleh dukungan lebih dari 60 persen suara rakyat Indonesia. Dengan bekal pencitraan bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan tidak pandang bulu tremasuk kepada besannya sendiri, SBY melenggang menuju kursi RI-1 dengan jargon "lanjutkan". Namun, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi jalan yang panjang. Mulai dari kasus pelemahan KPK, kasus Bank Century yang tidak jelas kelanjutannya karena sebagian besar kebijakan tersandera oleh koalisi Sekretariat Gabungan di parlemen. Menyusul setelahnya adalah kasus penggelapan pajak oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, sampai pada kasus Wisma Atlet dan Proyek Hambalang yang diduga melibatkan politisi Partai

Badan Anggaran juga telah dicium oleh KPK dengan pengakuan dari Wa Ode Nurhayati.

Kasus yang menimpa kader Partai Demokrat seperti Nazarudin Zulkarnaen, dan Angelina Sondakh ditengarai tidak hanya sampai pada tangan mereka. Namun, tuduhan yang dilayangkan Nazaruddin dkk bahwa Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga terlibat merupakan pukulan telak bagi partai. SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengalami situasi yang rumit karena ciitra partai yang didirikannya tersebut merosot karena korupsi. Sedangkan dalam berbagai macam kesempatan SBY selalu menekankan pada pemberantasan korupsi di negeri ini. Janji – janji yang diucapkan saat kampanye tidak sesuai dengan kenyataan di partainya sendiri. Inkonsistensi ini mengakibatkan kepercayaan terhadap pemerintah menurun di mata publik.

B. Kebijakan Pemberantasan Korupsi SBY

Susilo Bambang Yudhoyono ketika pertama kali dikukuhkan menjadi presiden RI pada Tahun 2004 mengucapkan enam janji dalam pemerintahannya. Keenam janji SBY tersebut, yakni sebagai berikut[176] : *pertama,* membentuk pemerintahan yang bersih dan baik *(good governance)* dan tanggap akan kebutuhan masyarakat. *Kedua,* pasca pelantikannya pada Oktober 2004 beberapa bulan sesudahnya akan digunakan untuk *management*

[176] Emerson Yuntho, *Negeri dikepung Koruptor; Pragmatisme dan Oligarkhi Politik telah*

masalah – masalah dalam negeri. *Ketiga,* pemerintah berkomitmen atas program pemberantasan korupsi secara aktif dan dipimpin langsung oleh presiden. *Keempat,* pemerintas mempunyai prioritas kebijakan pada bidang pendidikan dan kesehatan. *Kelima,* pengembangan dunia ekonomi dengan dialog konstruktif dengan pelaku dunia usaha. *Keenam,* peningkatan kualitas pelayanan dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah.

Dari keenam janji tersebut, pemberantasan korupsi merupakan janji yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Pada masa pemerintahan SBY dan JK janji yang diungkapkan pada masa kampanye terkait dengan pemberantasan korupsi diantaranya adalah komitmen terhadap upaya pemberantasan KKN dan kronisme dimulai dari pejabat tertinggi, efektifitas anggaran untuk supremasi hukum, dan efektifitas KPK serta BPK untuk membersihkan aparatur Negara.[177] Selain janji pada masa kampanye menjelang pilpres, komitmen tentang pemberantasan korupsi pemerintahan SBY ditunjukkan dalam berbagai pernyataan kepada publik.

Penekanan pada pemberantasan korupsi memang merupakan prioritas yang dijanjikan SBY dalam pemerintahannya. Sehingga hal tersebut menjadi daya tarik utama atas kepemimpinan SBY di Indonesia. Demikian juga mendekati pemilu presiden tahun 2009, isu pemberantasan korupsi merupakan amunisi bagi kampanye SBY selaku *incumbent*. Keseriusan pemerintahan SBY memang dinantikan oleh publik dalam penanganan kasus korupsi. Pada 17 Juni 2009, vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada

merupakan salah satu terdakwa dalam kasus ini atas dana senilai Rp 100 Miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) untuk BLBI.[178] Selain Aulia Pohan, terdakwa lain yang mengalami vonis dalam kasus besar ini diantaranya adalah Mantan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Maman H Soemantri, Bunbunan Hutapea, dan Aslim Tadjudin.

Vonis tersebut secara tidak langsung meningkatkan pencitraan SBY, khususnya kurang dari sebulan sebelum pilpres dilaksanakan.[179] Hal ini membuat publik percaya bahwa SBY serius dalam menangani korupsi. Dengan masuknya besan SBY dalam daftar terdakwa korupsi, menyebabkan isu pemberantasan korupsi pada kampanye pilpres 2009 menjadi isu utama SBY. Popularitas SBY atas kasus ini kemudian dimainkan menjadi bahan janji kampanye bahwasannya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan SBY tidak pandang bulu. Dan hal tersebut patut untuk dapat dilanjutkan. Meskipun kemudian keseriusan SBY tetap harus dibuktikan setelah berjalannya waktu. Pada akhirnya kepercayaan publik terhadap konsistensi SBY terjawab dengan kekecewaan ketika presiden memberikan remisi bahkan grasi kepada koruptor. Hal ini tentu saja merupakan preseden buruk bagi kekuatan penegakan hukum atas korupsi di negeri ini.[180]

Dengan gigihnya pernyataan SBY atas perang terhadap korupsi, berimplikasi pada harus adanya kebijakan – kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Selama pemerintahan SBY dalam dua periode kepresidenan, SBY telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai bentuk komitmennya

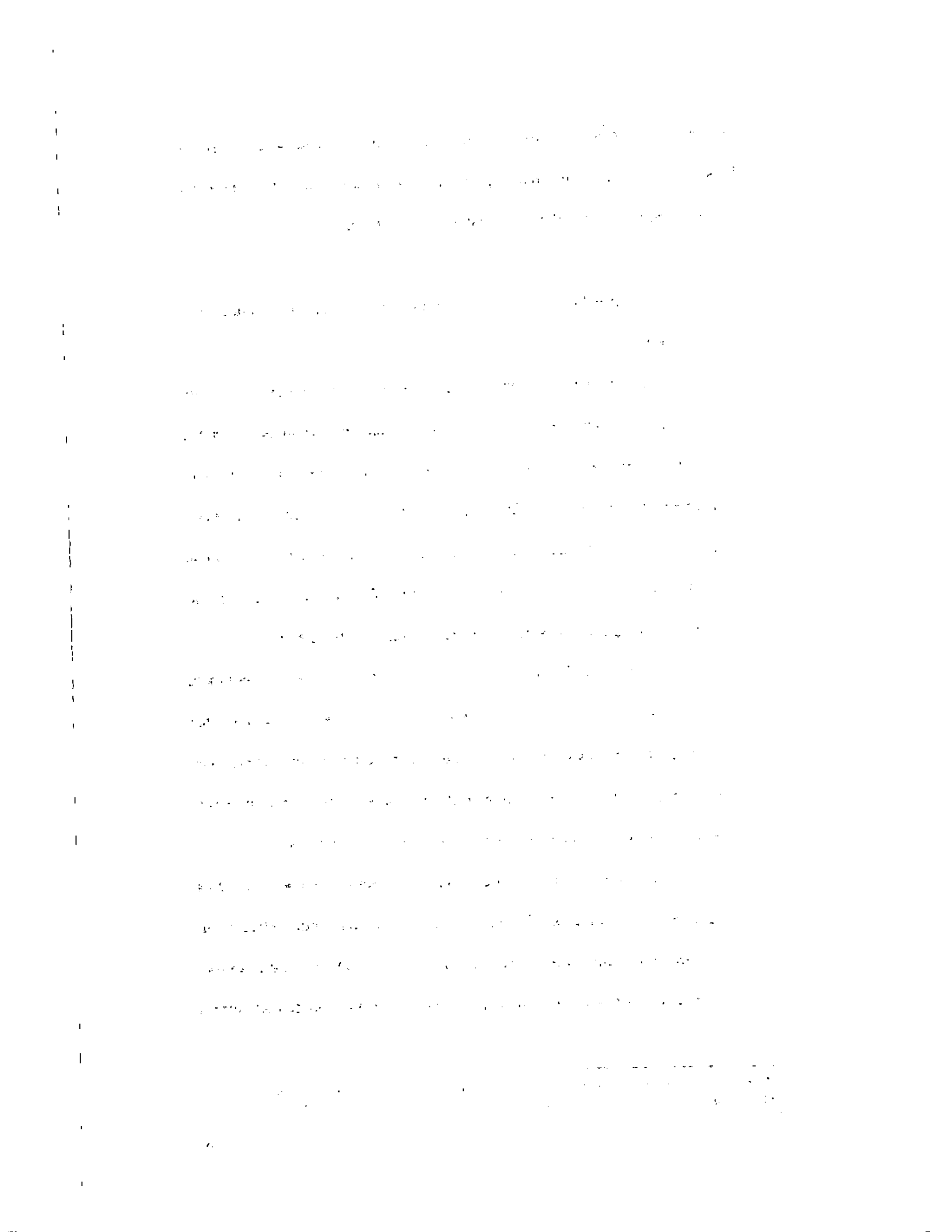

diterbitkan beberapa kebijakan berupa Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden. Selain itu, dibentuk juga badan – badan *ad hoc* yang diharapkan mampu mempercepat penuntasan tindak pidana korupsi.

1. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Pada tanggal 9 Desember 2004, presiden mengeluarkan Inpres No. 5/2004 diikuti dua paket langkah percepatan pemberantasan korupsi. Upaya tersebut merupakan *starting point* gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi dari pemerintahan SBY. Gerakan tersebut merupakan bentuk dari respon penetapan Hari Anti Korupsi se – dunia oleh PBB pada tanggal tersebut.[181] Inpres ini diharapkan sebagai alat yang dapat mempertajam peraturan perundangan yang telah ada.

Inpres 05/2004 diterbitkan sebagai benuk komitmen pemerintahan SBY dalam pemberantasan korupsi. Peraturan ini memberikan instruksi kepada jajaran pimpinan lembaga pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Adapun pokok – pokok inpres tersebut adalah sebagai berikut : *Pertama,* seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara Negara segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. *Kedua,* melakukan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di instansi pemerintahan. *Ketiga,* membuat penetapan kinerja

[181] Drs. Awang Anwaruddin, M.Ed, *Strategi Implementasi Percepatan Pemberantasan Korupsi,*

dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu.

Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. *Kelima,* menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi. *Keenam,* mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Ketujuh, menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara. *Kedelapan,* memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Polri, Kejari, dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka. *Kesembilan,* melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian

dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing - masing.

Kesepuluh, meningkatkan pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meminimalisir tindakan korupsi. Selanjutnya, secara khusus presiden mengamanatkan kepada 10 kementerian/lembaga (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PAN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kominfo, Kejaksanaan Agung, dan Polri), untuk menyusun kebijakan pemberantasan korupsi sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga mengamanatkan kepada seluruh Gubernur/Walikota agar dapat menerapkan prinsip - prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkunganan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, dan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Salah satu bentuk amanah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasonal (Bappenas) mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.[182] Dokumen RAN PK 2004-2009 menekankan kepada upaya pencegahan, penindakan, upaya pencegahan dan penindakan korupsi.

[182] Emerson Yuntho, *Op.Cit,* hal 11.

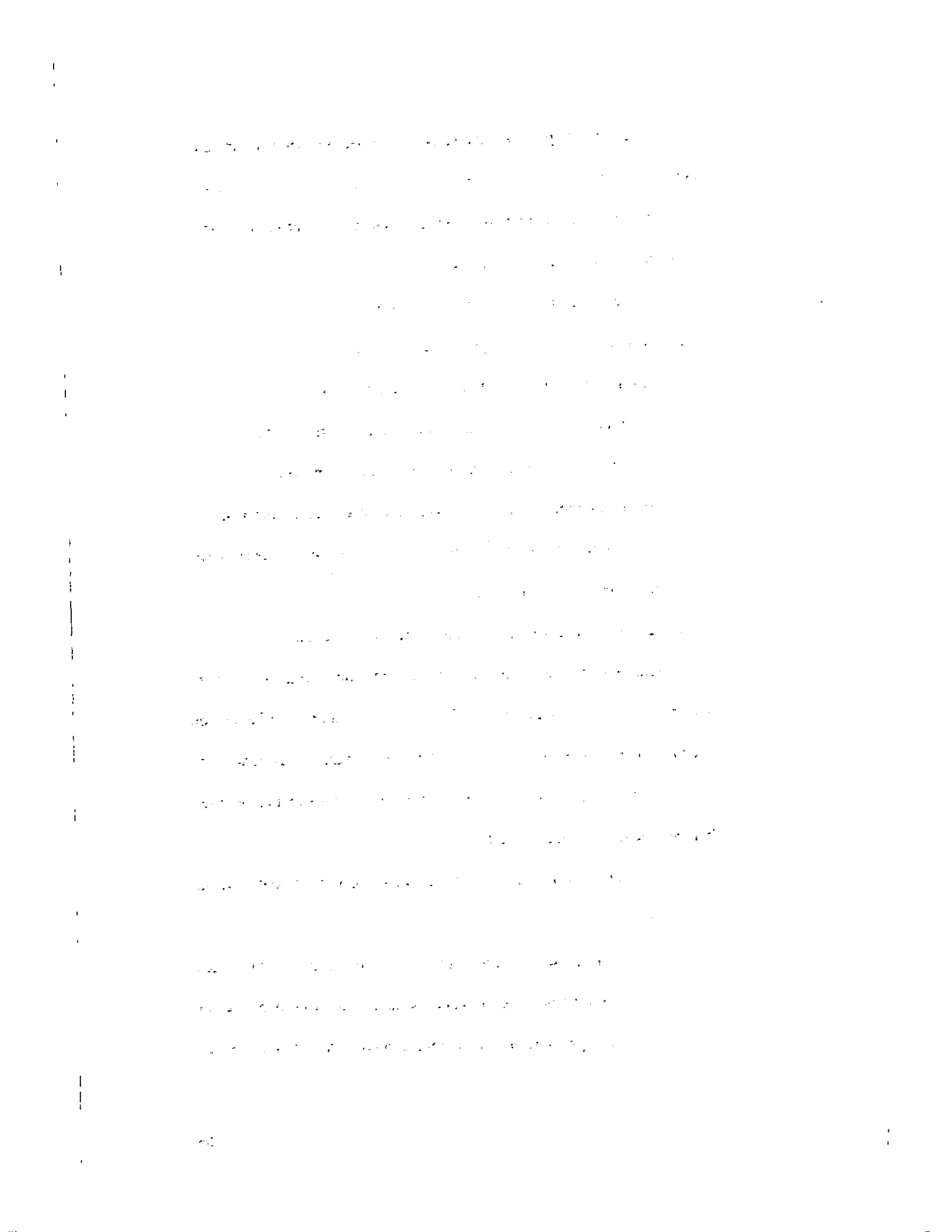

Upaya pencegahan dalam RAN PK 2004-2009 dirumuskan dalam langkah pencegahan pada bidang – bidang yang rawan terjadi penyimpangan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif (Bappenas : 2010). Yakni sebagai berikut :

1. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik,
2. Peningkatan Kinerja Layanan Pemerintahan,
3. Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Publik,
4. Peningkatan Pengawasan atas Pelayanan kepemerintahan,
5. Penyempurnaan Sistem Manajemen Keuangan negara,
6. Penyempurnaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
7. Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Aparatur Negara,
8. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.

Selanjutnya adalah upaya penindakan yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan penguatan pemberdayaan peraturan perundang – undangan dalam mendukung pemberantasan korupsi. Adapun langkah – langkah prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas adalah sebagai berikut :

1. Percepatan penanganan dan eksekusi perkara tindak pidana korupsi.
    a. Menentukan sektor prioritas pemberantasan korupsi dan mengaplikasikan indikator kinerja atas penanganan kasus korupsi yang ada guna mempercepat proses penyelesaian;

b. Mendukung penambahan jumlah hakim ad hoc untuk Pengadilan Korupsi;

c. Memperbaiki koordinasi antara Badan Audit Internal dan eksternal dengan badan penegak hukum.

2. Peningkatan dukungan terhadap lembaga penegak hukum.

a. Menyediakan penelusuran harta, audit hukum, pelatihan akuntansi, audit forensik dan hubungan masyarakat;

b. Memperbaiki pengelolaan sistem pengawasan atas badan penegak hukum;

c. Melanjutkan percepatan pembentukan Komisi Jaksa serta Komisi Polisi sebagai badan pengawas eksternal.

3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum;

4. Pengembangan sistem Pengawasan lembaga penegak hukum.

Sedangkan upaya pengawasan dan evaluasi dirumuskan dalam bentuk :

1. Pembentukan sistem monitoring.

2. Pengumpulan informasi mengenai proses peradilan yang berkaitan dengankorupsi.

3. Melaksanakan survei atas korupsi.

4. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan RAN-PK yang berkaitan denganperbaikan peraturan yang ada.

Belum genap lima bulan usia gerakan tersebut, pada tanggal 28 April 2005 Presiden Yudhoyono mengumumkan lagi delapan langkah

[183] Untuk menaladani Presiden bahkan

berniat untuk memulai pembersihan di lingkungan lembaga kepresidenan, termasuk yayasan-yayasan di lingkungan Sekretariat Negara, Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, dan Sekretariat Kabinet Komitmen tersebut tentu tidak main-main karena dilakukan di depan para petinggi yang terkait erat dengan pemberantasan korupsi, seperti Kapolri, Jaksa Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan Komisi Ombudsman. Di samping itu, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Politik Hukum dan Keamanan Juwono Sudarsono, Menko Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

2. Inpres Nomor 09/2011 tentang PPK Tahun 2011 dan Inpres Nomor 17/2011 tentang Aksi Nasional PPK Tahun 2012

Selain penerbitan Inpres 05/2004, perangkat kebijakan lain yang diterbitkan oleh SBY adalah Inpres Nomor 09/2011 pada 12 Mei 2011. Inpres ini merupakan bentuk kebijakan untuk jangka waktu setahun untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Sehingga, pada tanggal 19 Desember 2011 diterbitkan juga Inpres 17/2011 untuk tahun 2012. Kedua produk hukum tersebut berisi tentang penegasan tugas – tugas menteri, dan pimpinan lembaga – lembaga

Hal ini terkait dengan implementasi. dokumen sebelumnya berupa Inpres 05/2004 dan Rencana Aksi Nasional pemberantasan korupsi. Penekanan pada inpres ini adalah kewajiban melaksanakan rencana aksi sesuai dengan yang dijabarkan yakni sebagai berikut : Strategi Bidang Pencegahan; Strategi Bidang Penindakan; Strategi Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan; Strategi Bidang Penyelamatan Aset Hasil Korupsi; Strategi Bidang Kerjasama Internasional; dan Strategi Bidang Mekanisme Pelaporan.

Kedua buah peraturan ini berisi instruksi kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk memaksimalkan fungsi masing – masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Inpres 09/2011 dan Inpres 17/2011 merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 .

Inpres 09/2011 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011, sedangkan Inpres 17/2011 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah 2012. Kedua inpres ini memberikan porsi masing – masing pada Menteri Koordinator untuk dapat melaporkan secara berkala pelaksanaan rencana aksi di bawah koordinasi masing – masing. Presiden

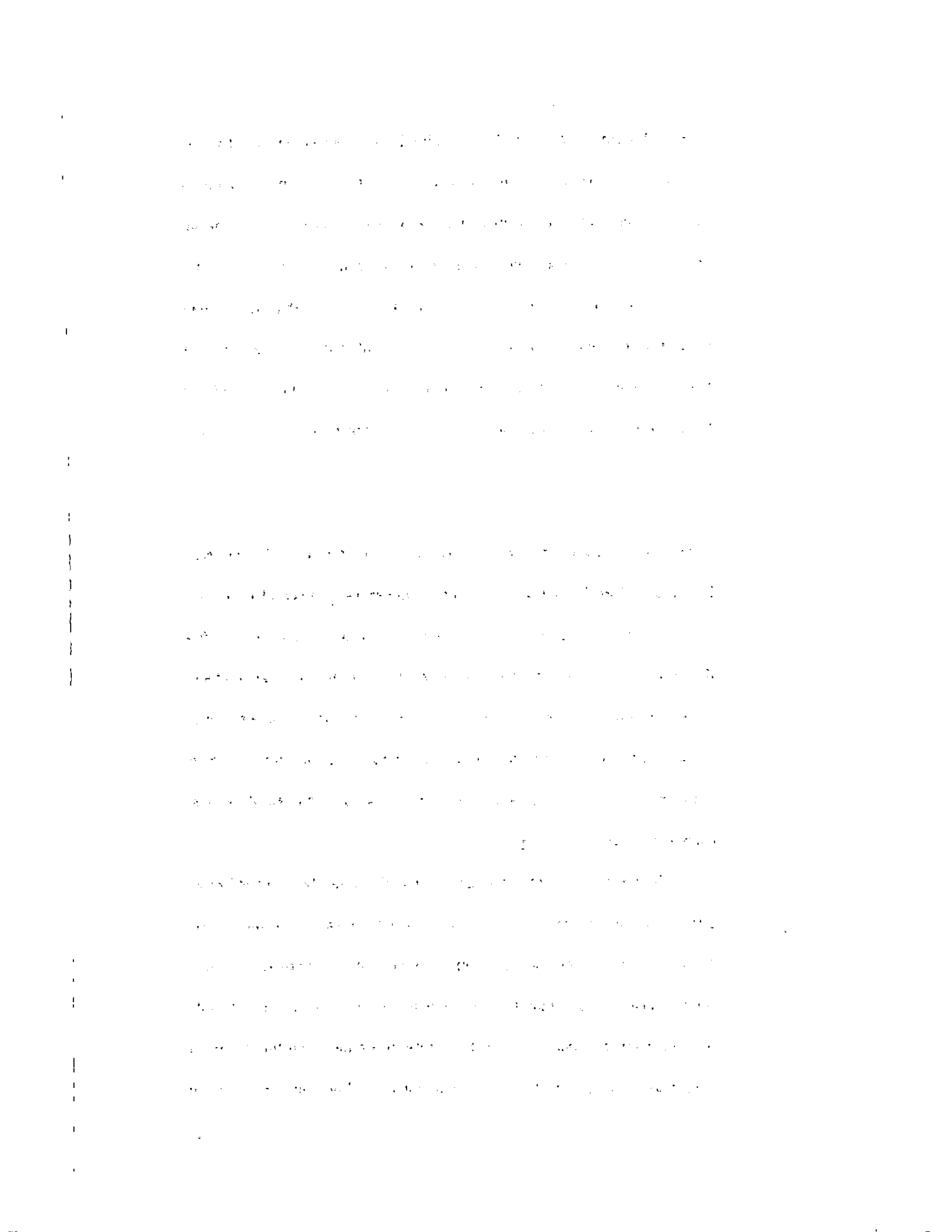

Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, wajib berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ombudsman Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Mahkamah Agung. Keterlibatan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP3) juga ditekankan. Yakni dalam rangka melakukan pemantauan kemajuan secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

3. Peraturan Presiden Nomor 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014

Stranas PPK dikeluarkan oleh pemerintah dengan asumsi dibutuhkan acuan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK). Stranas PPK dinilai dibutuhkan agar berdampak konkret bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan, serta konsolidasi demokrasi. Stranas PPK memiliki visi jangka panjang dan menengah.

Visi periode jangka panjang (2012-2025) adalah: *"terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas"*. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) bervisi *"terwujudnya tata-kepemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta*

akan diwujudkan di segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.

Visi tersebut dituangkan ke dalam misi-misi berikut: *pertama*, membangun dan memantapkan sistem, mekanisme, kapasitas pencegahan dan penindakan korupsi yang terpadu secara nasional; *kedua,* melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung PPK secara konsisten, terkonsolidasi, dan tersistematis; *ketiga,* membangun dan mengonsolidasikan sistem dan mekanisme penyelamatan aset hasil korupsi melalui kerjasama nasional dan internasional secara efektif; *keempat,* membangun dan menginternalisasikan budaya antikorupsi pada tata-kepemerintahan dan masyarakat; serta *kelima,* mengembangkan dan mempublikasikan sistem pelaporan kinerja implementasi stranas PPK secara terintegrasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka telah ditetapkan enam strategi PPK. Di bawah ini adalah keenam strategi yang dimaksud:

1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penindakan
3. Melaksanakan Harmonisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pemberantasan Korupsi dan sektor lainnya yang terkait
4. Melaksanakan Penyelamatan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi

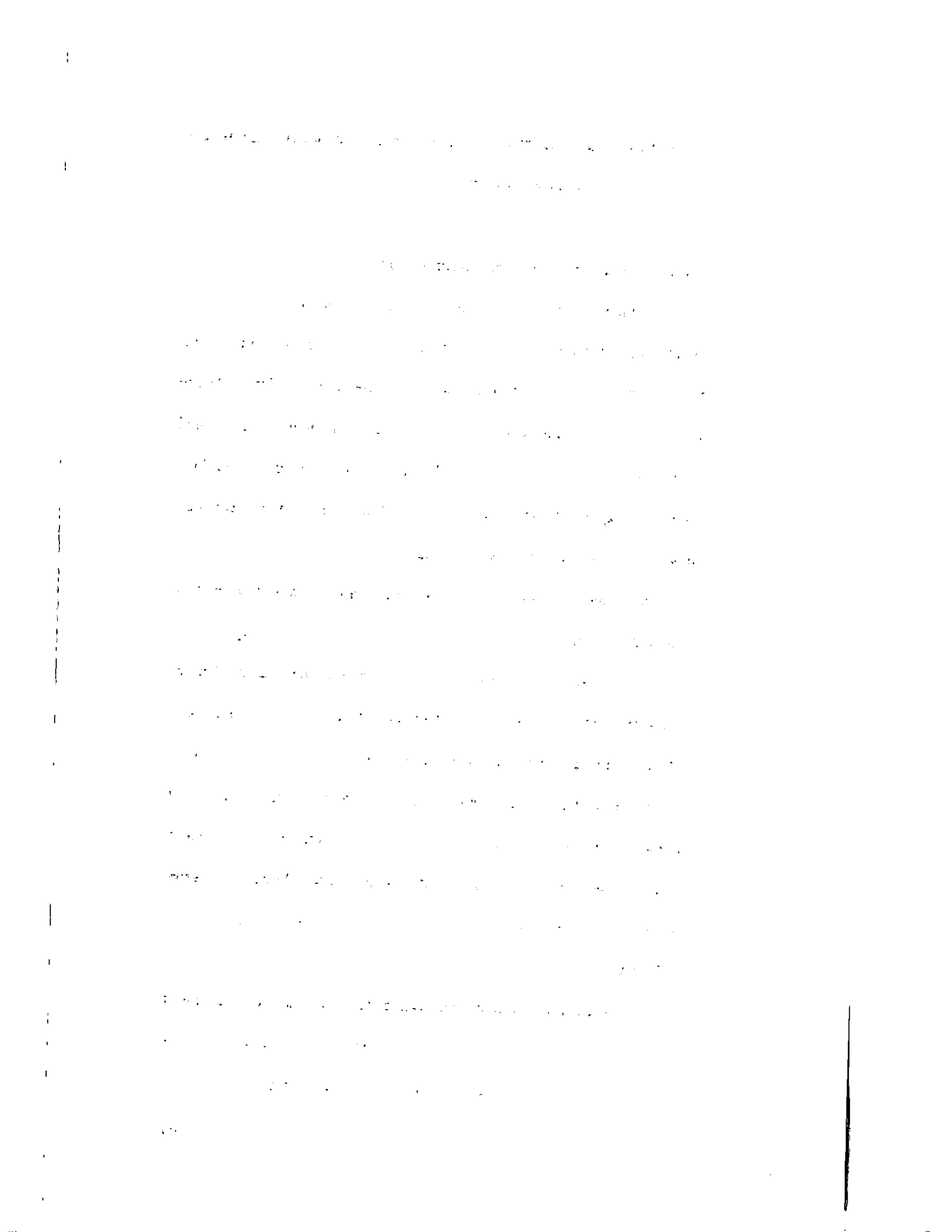

6. Meningkatkan Koordinasi dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Upaya Pemberantasan Korupsi

4. Tim Pemburu Koruptor dan Timtastipikor

Kebijakan selain berbentuk peraturan pendukung UU Tipikor, adalah pembentukan lembaga – lembaga *ad hoc*. Dengan tujuan untuk memperkuat kinerja kelembagaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang telah berdiri sejak 27 Desember 2002 sebagai amanat UU Nomor 31 Tahun 1999. Tahun 2004, pemerintahan SBY dalam melalui Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membentuk Tim Pemburu Koruptor (TPK).

Tim Pemburu Koruptor dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor Kep-54/Menko/Polhukam/12/2004 tanggal 17 Desember 2004 yang telah diperbarui dengan Keputusan Menko Polhukam nomor Kep-05/Menko/Polhukam/01/2009 tanggal 19 Januari 2009 dan beranggotakan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Tim ini pertama kali diketuai oleh Basrief Arief , kemudian berturut – turut digantikan oleh Muchtar Arifin, Abdul Hakim Ritonga, dan Darmono.

Tim Pemburu Koruptor merupakan tim pertama yang dibentuk oleh SBY untuk memberantas korupsi. Upaya yang dilakukan oleh tim

3. Bambang Sutrisno, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp.1,5 triliun, telah divonis seumur hidup.
4. Adrian Kiki Ariawan, kasus BLBI Bank Surya senilai Rp. 1,5 triliun, telah divonis seumur hidup.
5. Eddy Tansil, kasus ekspor fiktif senilai Rp.1,3 triliun, telah divonis 20 tahun penjara oleh PN Jakarta Pusat.
6. Sujiono Timan, kasus BPUI senilai US$ 126 juta, telah divonis 14 tahun penjara oleh MA.

Selain Tim Pemburu Koruptor, SBY pada tahun 2005 merasa perlu untuk membentuk tim khusus lagi bernama Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Timtas tipikor dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 11/2005 dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang saat itu dijabat oleh Hendarman Supandji. Presiden memberikan sejumlah data terkait dengan kasus dugaan korupsi. Kasus - kasus tersebut diantaranya adalah Dana Alokasi Umat (DAU), kasus Bank Mandiri, dan lain sebagainya.[187]

Timtas tipikor adalah tim gabungan yang terdiri atas unsur kepolisian, Kejaksaan Agung, dan badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "*Kelembagaan yang terkesan amburadul dengan kewenangan dan tugas yang tumpang tindih tersebut menurut penjelasan Jagung Muda Bidang Intelijen, sebenarnya saling melengkapi*".[188] KPK bersifat *independent* namun memiliki kewenangan luas untuk menyidik [illegible] sedang berlangsung dan menyelidiki kasus korupsi

sebelum komisi ini berdiri, termasuk kewenangan untuk mengambil-alih penanganan kasus korupsi dari lembaga lain. Sementara Timtas tipikor yang terdiri dari komponen jaksa, polisi dan petugas BPK berwenang menyelidiki dan melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di samping menelusuri dan mengamankan seluruh aset para koruptor. Sedangkan Tim Pemburu Koruptor, sesuai dengan namanya, bertugas memburu dan menangkap terpidana korupsi yang sudah divonis dan harus dieksekusi. Kunci keberhasilan kinerja ketiga lembaga anti korupsi ini adalah koordinasi dan kerjasama dalam menangani kasus korupsi.

Namun, faktanya tidak ada peran signifikan dari Timtas tipikor sebagaimana yang terjadi pada Tim Pemburu Koruptor. Dengan tugas menyelesaikan perkara korupsi di 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 4 departemen, 3 perusahaan swasta, serta 12 koruptor yang melarikan diri ke luar negeri hanya enam perkara korupsi yang masuk ke pengadilan sampai sebelum Mei 2007.[189] Timtas Tipikor akhirnya dibubarkan oleh presiden pada tanggal 2 Mei 2007.

[189] Emerson Yuntho, *Op.Cit,* hal 13.